

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Kabupaten Jember, 2021, profil dari Kabupaten Jember (<https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>), diakses pada 13 Oktober 2022.
- Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 pasal 100b tentang “30% maksimal untuk belanja operasional pemerintah desa, dan minimal 70% untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat”.
- Permendagri RI No. 36 Tahun 2020, Pasal 1, bahwa: “Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga”.
- Romney (2014:10) “sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan”.  
<https://creatormedia.my.id/komponen-sistem-informasi-akuntansi-menurut-romney-dan-steinbart/>
- Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (No. 20 Tahun 2018) pada tanggal 11 April 2018 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “Pemberian Otonomi Luas Kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”.
- Permendagri RI Nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa “kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang pagu indikatif desa dan rencana program kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa diterima kepala desa dari kabupaten atau kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan”.